



Profil Ketenagakerjaan Tahun 2016

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam



VISI KOTA BATAM



**”Terwujudnya Batam sebagai
Bandar Dunia Madani
yang Berdaya Saing, Maju,
Sejahtera, dan Bermartabat”**

VISI DAN MISI DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

VISI:

“ Tersedianya Tenaga Kerja yang kompeten dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis ”.

MISI:

- Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja melalui pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja**
- Meningkatkan pembinaan dan penempatan tenaga kerja**
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan Hubungan Industrial**
- Terlaksananya penyelesaian perselisihan dan kepatuhan hukum**
- Mewujudkan pelayanan prima yang didukung oleh sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas**

Batam Area

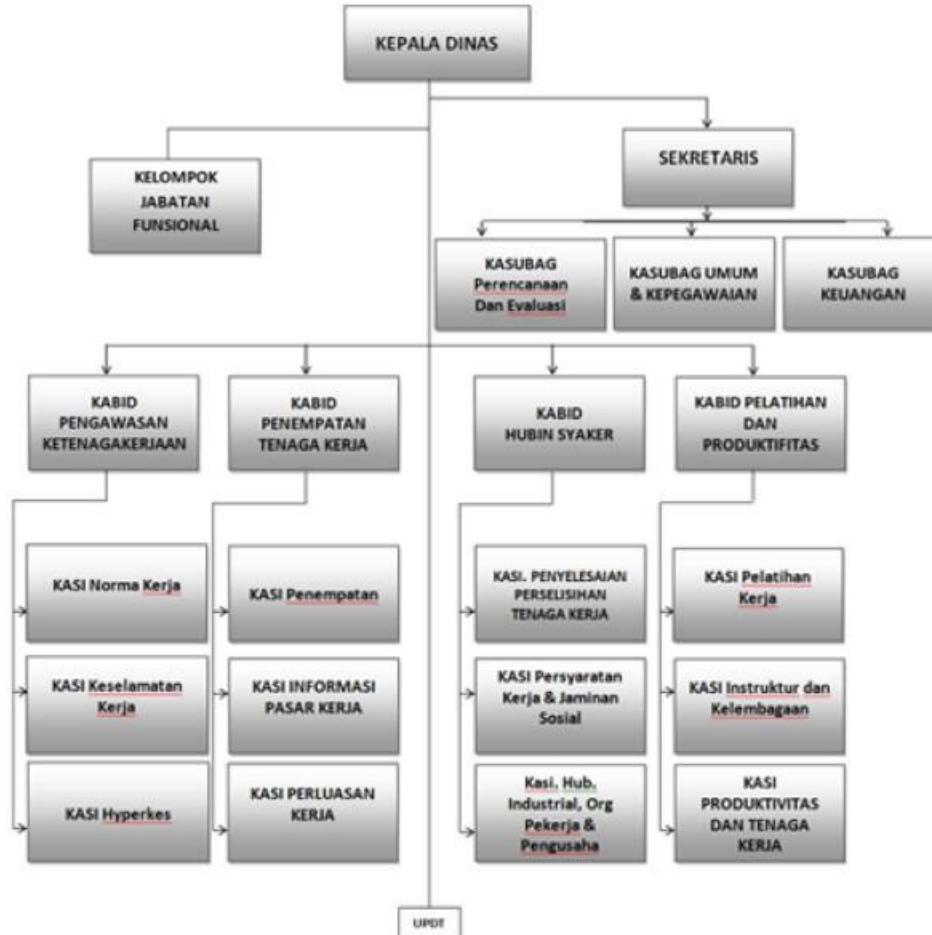
Peta Kota Batam



STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Berdasarkan Perda Kota Batam
Nomor. 12 Tahun 2007





**Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terdiri dari
1 Sekretaris dan 4 Bidang :**

1. Sekretariat

- * Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- * Sub Bagian Keuangan
- * Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

- * Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- * Seksi Perluasan Kerja
- * Seksi Informasi Pasar Kerja



3. Bidang Pelatihan dan Produktifitas

- * Seksi Pelatihan Kerja
- * Seksi Instruktur dan Kelembagaan
- * Seksi Produktifitas Tenaga Kerja

4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja

- * Seksi Bantuan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial
- * Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
- * Seksi Hubungan Industrial Organisasi Pekerja dan Pengusaha

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

- * Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- * Seksi Keselamatan Kerja
- * Seksi Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang kesekretariatan dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Penghimpun, dan pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana Dinas Tenaga Kerja;
3. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga dinas;
4. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
5. Pementauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- 
- 1. Pelaksanaan penyusunan program kerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;**
 - 2. Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja dinas;**
 - 3. Pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja dinas;**
 - 4. Penghimpunan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dinas;**
 - 5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan lingkap tugasnya;**
 - 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.**

Sub Bagian Keuangan

- 
- 1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;**
 - 2. Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran dinas;**
 - 3. Penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;**
 - 4. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan dinas;**
 - 5. Pelaksanaan administrasi gaji pegawai lingkup dinas;**
 - 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dinas;**
 - 7. Pelaksanaan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;**
 - 8. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;**
 - 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.**

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
3. Mengelola surat menyurat dan kearsipan;
4. Mengelola urusan rumah tangga;
5. Mengelola sarana prasarana perkantoran;
6. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
7. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. Melaksanakan pengembangan pegawai;
9. Menyelenggarakan analisis jabatan dan beban kerja;
10. Mengelola Tata Usaha Kepegawaian;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 
1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja penempatan tenaga kerja;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi pembinaan, penempatan, perluasan kerja dan informasi kerja;
 3. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap perusahaan LPPS dan PPTKIS dalam pelaksanaan program penempatan kerja.
 4. Pelaksanaan kegiatan teknis penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan informasi pasar kerja;
 5. Pelaksanaan penerbitan IMTA Perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya di wilayah Kota Batam;
 6. Pelaksanaan pelaporan tugas dan evaluasi bidang penempatan tenaga kerja;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja

- 
1. Penyusunan rencana program kerja lingkup seksi penempatan tenaga kerja;
 2. Pelaksanaan pertemuan dengan para pengusaha dalam rangka pertukaran informasi penempatan tenaga kerja;
 3. Pembuatan rancangan konsep surat pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) dan Penampungan Perusahaan Penggerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS);
 4. Pelaksanaan pembinaan terhadap Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) dan Penampungan Perusahaan Penggerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS);
 5. Pembuatan rancangan konsep surat rekomendasi tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD);
 6. Penelitian dan pemrosesan permohonan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya di Kota Batam;
 7. Penelitian, pengatur, penyeleksian tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 8. Pelaksanaan penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan penempatan tenaga kerja;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Perluasan Kerja

- 
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi perluasan kerja;
 2. Pelaksanaan inventarisasi data/informasi terhadap potensi daerah dan teknologi tepat guna;
 3. Perencanaan kegiatan dengan sistem/metode teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi daerah;
 4. Pelaksanaan penciptaan lapangan kerja dengan menggunakan sistem padat karya luar perkotaan/ hinterland;
 5. Pelaksanaan potensi daerah agar dikembangkan untuk penentuan sektor mandiri;
 6. Pemantauan, penganalisaan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perluasan kerja;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Informasi Pasar Kerja

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi informasi pasar kerja;
2. Pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja dan lowongan kerja;
3. Penyajian dan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media elektronik, media cetak dan media informasi lainnya;
4. Pembuatan dan penyajian statistik data dan naskah pencari kerja;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis seksi informasi pasar kerja;
6. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas seksi informasi pasar kerja;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

- 
1. Penyusunan program kerja bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja;
 2. Penyiapan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis pelatihan dan produktifitas kerja;
 3. Penghimpunan dan penyusunan langkah kegiatan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja berdasarkan rencana kerja;
 4. Pemberian bimbingan terhadap lembaga pelatihan swasta di bidang pelatihan untuk mengupayakan hubungan kerja yang baik;
 5. Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dan swasta di bidang pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja;
 6. Penganalisaan potensi sumber daya daerah, penyuluhan dan sosialisasi produktifitas;
 7. Pelaksanaan pelaporan tugas dan evaluasi bidang pelatihan dan produktifitas;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya



Seksi Pelatihan Kerja

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup seksi pelatihan kerja;
2. Pelaksanaan analisa kebutuhan latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja;
3. Penyelenggaraan administrasi pelatihan dan pemagangan;
4. Pengumpulan bahan rencana dan program pelatihan dan pemagangan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelatihan dan pemagangan kerja;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi tugas lingkup pelatihan dan pemagangan kerja;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Instruktur dan Kelembagaan

- 
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi instruktur dan kelembagaan;
 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi lembaga pelatihan;
 3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan lembaga pelatihan swasta;
 4. Pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan instruktur dan kelembagaan;
 5. Melaksanakan pemantauan penyelenggarakan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga swasta;
 6. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap instruktur dan lembaga pelatihan swasta;
 7. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi tugas lingkup seksi instruktur dan kelembagaan;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup seksi produktifitas tenaga kerja;
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan di bidang manajemen dan produktifitas serta program sertifikasi dalam rangka meningkatkan kemampuan berusaha;
3. Pelaksanaan usaha-usaha pengembangan produktifitas dan sertifikasi tenaga kerja disektor industri dan jasa pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta melalui seminar, penyuluhan dan pengukuran produktifitas tenaga kerja serta konsultasi manajemen dan produktifitas;
4. Penginventarisasian kelembagaan, instruktur, tenaga pelatihan program dan kegiatan pengembangan produktifitas serta menginventarisasi data program yang mencakup jenis pelatihan, kualifikasi luaran serta lembaga penyelenggarannya;
5. Penginventarisasian lembaga pelaksana pengembangan produktifitas yang mencakup program jenis kegiatan, sertifikasi tenaga kerja yang mencakup jenis sertifikasi yang berlaku, jumlah tenaga kerja menurut sertifikasinya dan jumlah lembaga pelatihan menurut akreditasinya;
6. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan produktifitas untuk meningkatkan kualitas pelatihan lembaga latihan;
7. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan produktifitas untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan akreditasi lembaga latihan;
8. Pelaksanaan uji keterampilan, akreditasi lembaga latihan dan sertifikasi tenaga kerja;
9. Pelaksanaan bimbingan ke instansi Pemerintah, BUMD/BUMN, perusahaan swasta dan lembaga latihan kerja yang menyangkut program dan sertifikasi tenaga kerja untuk peningkatan produktifitas;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program pengembangan produktifitas dan program sertifikasi tenaga kerja untuk mengetahui tingkat kemajuan serta bahan penyempurnaan kegiatan yang akan datang;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya dalam lingkup Bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRI DAN SYARAT-SYARAT KERJA

1. Penyusunan rencana program kerja hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
2. Pengkoordinasian dan pemberian pembinaan berupa bimbingan terhadap mediator dan pegawai-pegawai di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
3. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan penanganan perselisihan tenaga kerja, persyaratan kerja dan jaminan sosial serta hubungan industrial, organisasi pekerja dan pengusaha;
4. Pembinaan terhadap lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
5. Pembinaan terhadap serikat pekerja/serikat buruh;
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja;
7. Penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Bantuan Persyaratan Kerja & Jaminan Sosial

- 
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial;
 2. Pelaksanaan pembinaan mengenai syarat-syarat kerja, dan perjanjian kerja jaminan sosial di perusahaan-perusahaan;
 3. Pemeriksanaan, penelitian dan pengoreksian perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang diajukan oleh perusahaan;
 4. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan syarat-syarat kerja, dan perjanjian kerja jaminan sosial di perusahaan-perusahaan;
 5. Pelaksanaan peran fasilitasi pelaksanaan survey dan menganalisa data Kebutuhan hidup layak (KHL);
 6. Pelaksanaan peran fasilitasi pembahasan Upah Minimum Kota (UMK)/ Upah Minimum Sektoral (UMS);
 7. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK)/Upah Minimum Sektoral (UMS);
 8. Pelaksanaan penyiapan laporan dan evaluasi tugas persyaratan kerja dan jaminan sosial;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelesaian Perselisihan

Tenaga Kerja

- 
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
 2. Pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan lingkup seksi penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
 3. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
 4. Penanganan dan penyelesaian kasus perselisihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Penyiapan surat anjuran berdasarkan data penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan hubungan industrial sebagai dasar pertimbangan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
 6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan pemogokan buruh serta menyiapkan evaluasi dan laporan kepada atasan dan instansi terkait;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



Seksi Hubungan Industrial Organisasi Pekerja dan Pengusaha

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;
2. Pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;
3. Pelaksanaan penyuluhan hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;
4. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial bagi pengurus dan anggota organisasi pekerja dan pengusaha;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kepada lembaga kerja sama (LKS) Bipartit dan Tripartit;
6. Pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, verifikasi dan penyajian data organisasi pekerja dan pengusaha;
7. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;
8. Penyiapan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat-Syarat Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- 
1. PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN;
 2. PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS, FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETENAGAKERJAAN;
 3. PENGKOORDINASIAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI PENGAWAS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BIDANG KETENAGAKERJAAN;
 4. PENGKOORDINASIAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PELAKSANAAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN;
 5. PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN SESUAI DENGAN LINGKUP TUGAS DAN FUNGSINYA;
 6. PELAKSANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI TUGAS DI BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN;
 7. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA SESUAI DENGAN LINGKUP TUGAS DAN FUNGSINYA.

Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, lingkup norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan yang meliputi norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja baik pemeriksaan pertama maupun secara berkala dan pemeriksaan khusus;
4. Pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang norma kerja;
5. Pencatatan hasil pengawasan serta temuan yang dituangkan dalam nota pemeriksaan dan mengirim kepada perusahaan setelah mendapatkan persetujuan atasan;
6. Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan konsultasi kepada perusahaan dan tenaga kerja berkenaan dengan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
7. Pengumpulan dan pengolahan data mengenai pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan laporan dari badan penyelenggara;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan penyiapan laporan dan evaluasi tugas lingkup norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Keselamatan Kerja

- 
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup seksi keselamatan kerja;
 2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja mekanik, dan konstruksi bangunan;
 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja listrik dan penanggulangan kebakaran;
 4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja pesawat uap dan bejana tekan;
 5. Pelaksanaan kebijakan teknis keselamatan kerja;
 6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 7. Pelaksanaan penyiapan laporan dan evaluasi tugas pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

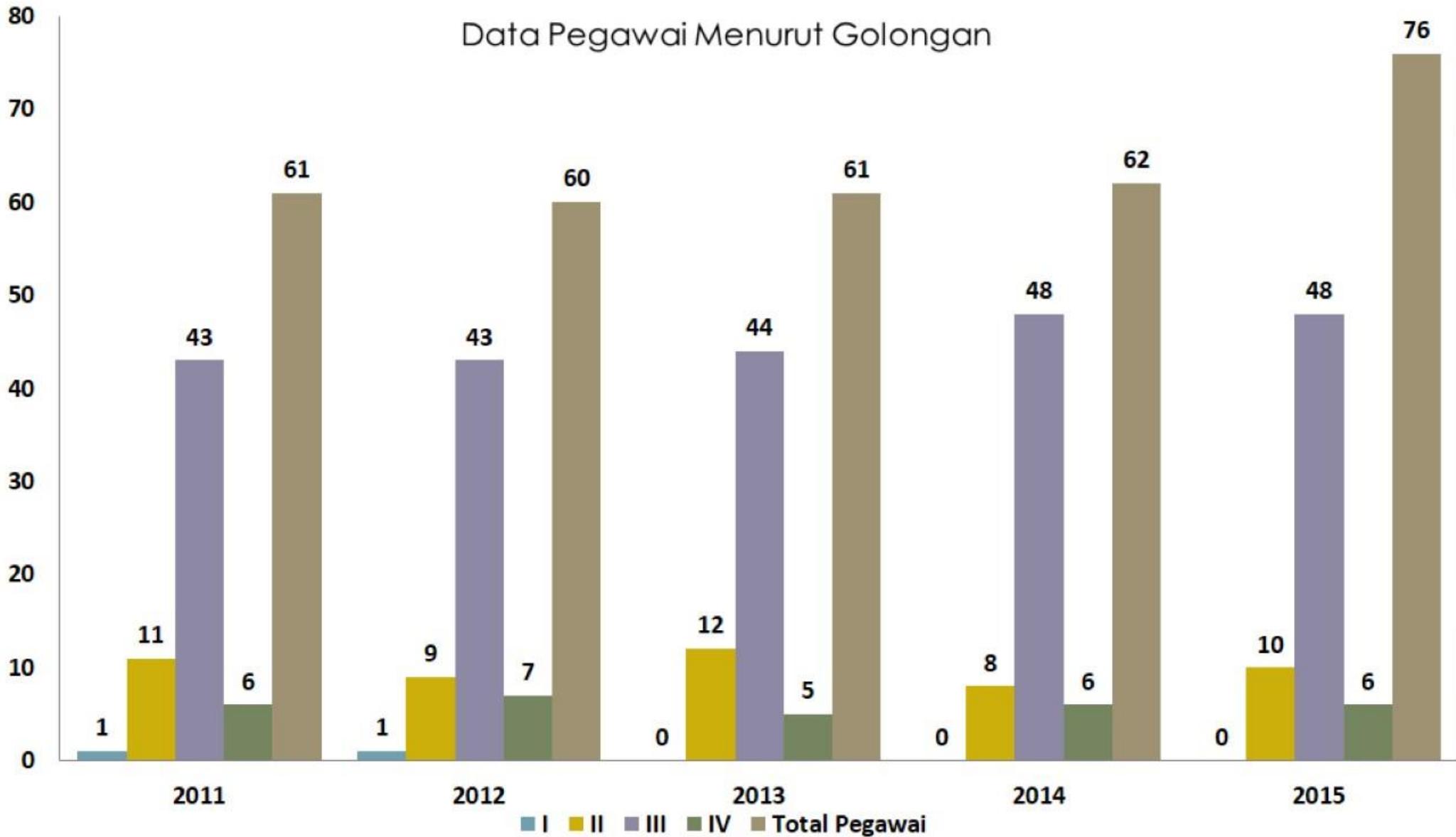
Seksi Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja

- 
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup hygiene perusahaan dan kesehatan kerja;
 2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tentang peraturan kesehatan dan lingkungan kerja;
 3. Pelaksanaan pembinaan program sarana dan profesi hygiene perusahaan, ergonomi dan kesehatan kerja;
 4. Pengadaan penelitian dan terapan hygiene perusahaan, ergonomi dan kesehatan kerja;
 5. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 6. Pelaksanaan analisis penyiapan standarisasi akreditasi hygiene perusahaan, dan ergonomi kesehatan kerja;
 7. Pencatatan hasil pengawasan serta temuan tentang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja yang dituangkan dalam nota pemeriksaan dan dikirim kepada perusahaan setelah mendapat persetujuan atasan;
 8. Pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran norma hygiene perusahaan dan kesehatan kerja;
 9. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 10. Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas lingkup hygiene perusahaan dan kesehatan kerja;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

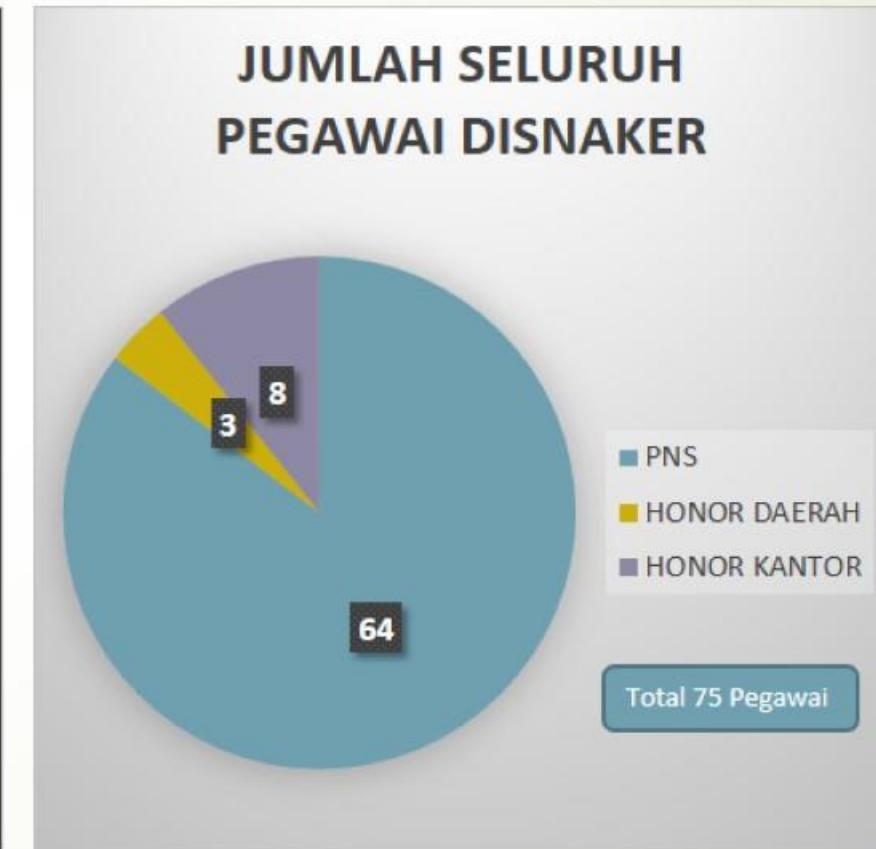
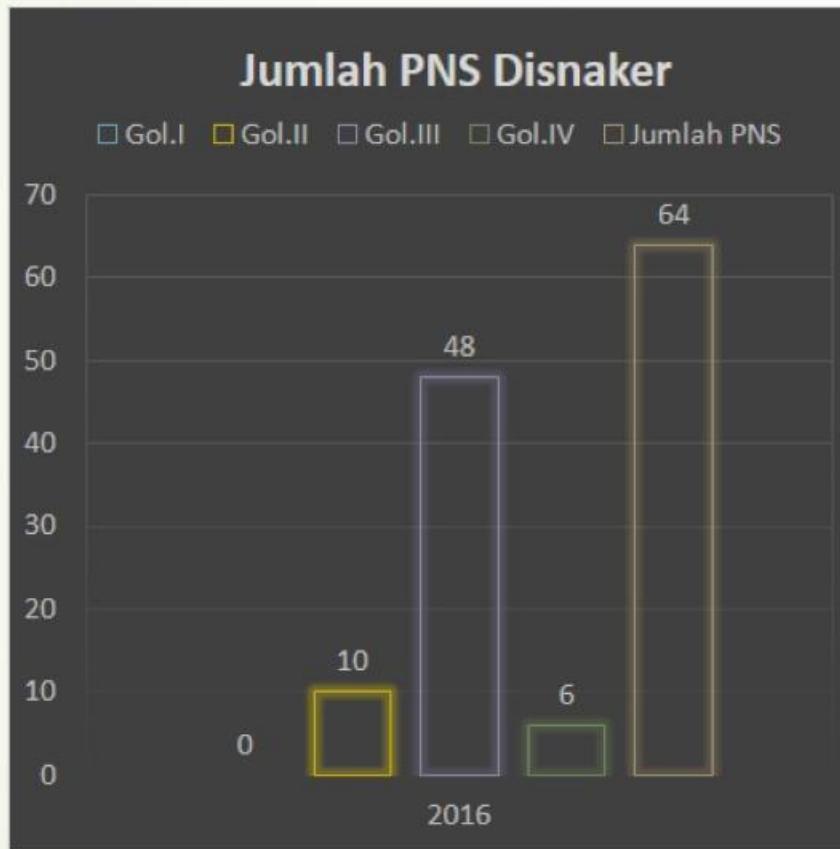
JUMLAH APBD DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN 2011 - 2016



Data Pegawai Menurut Golongan



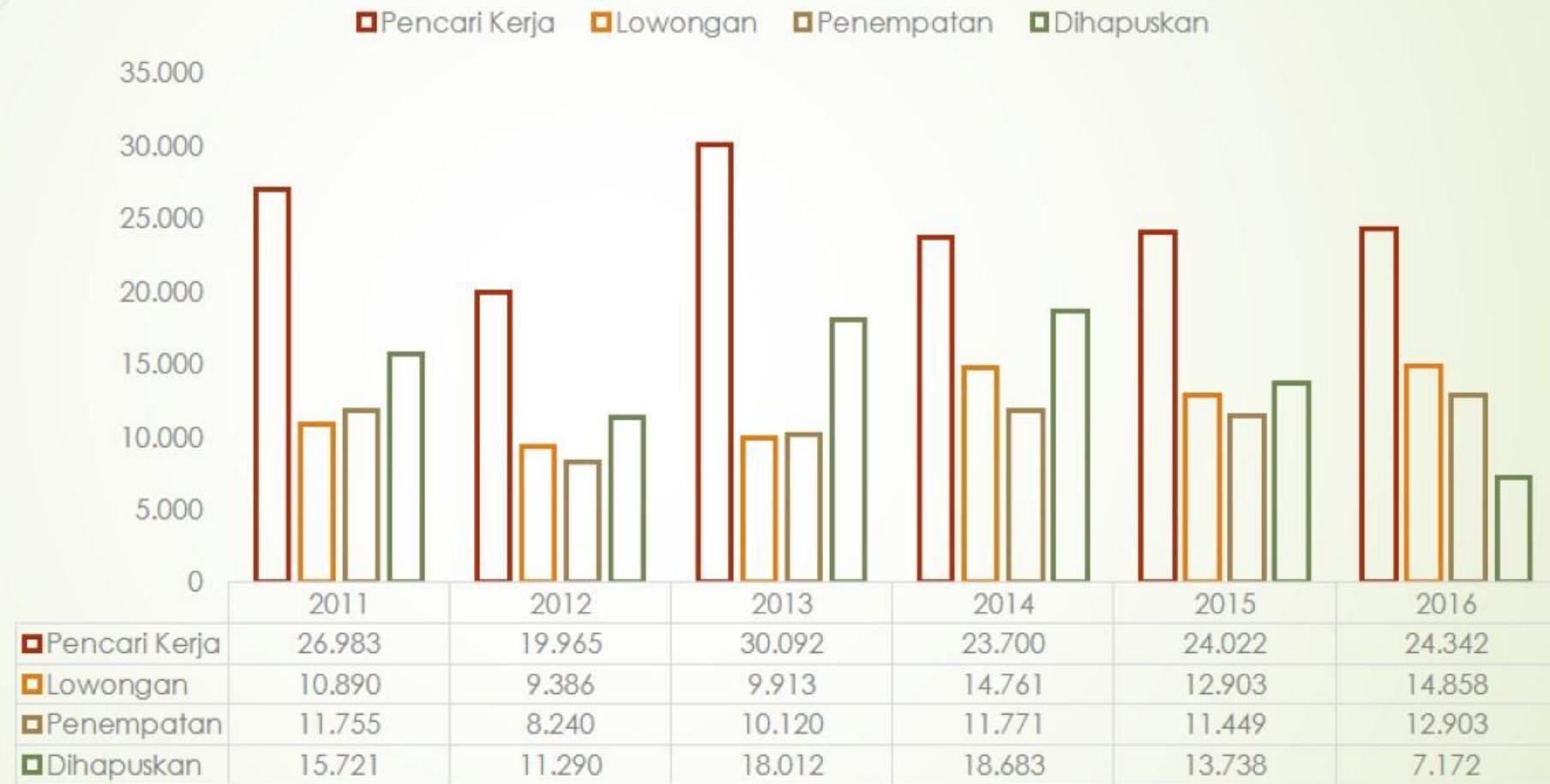
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2016



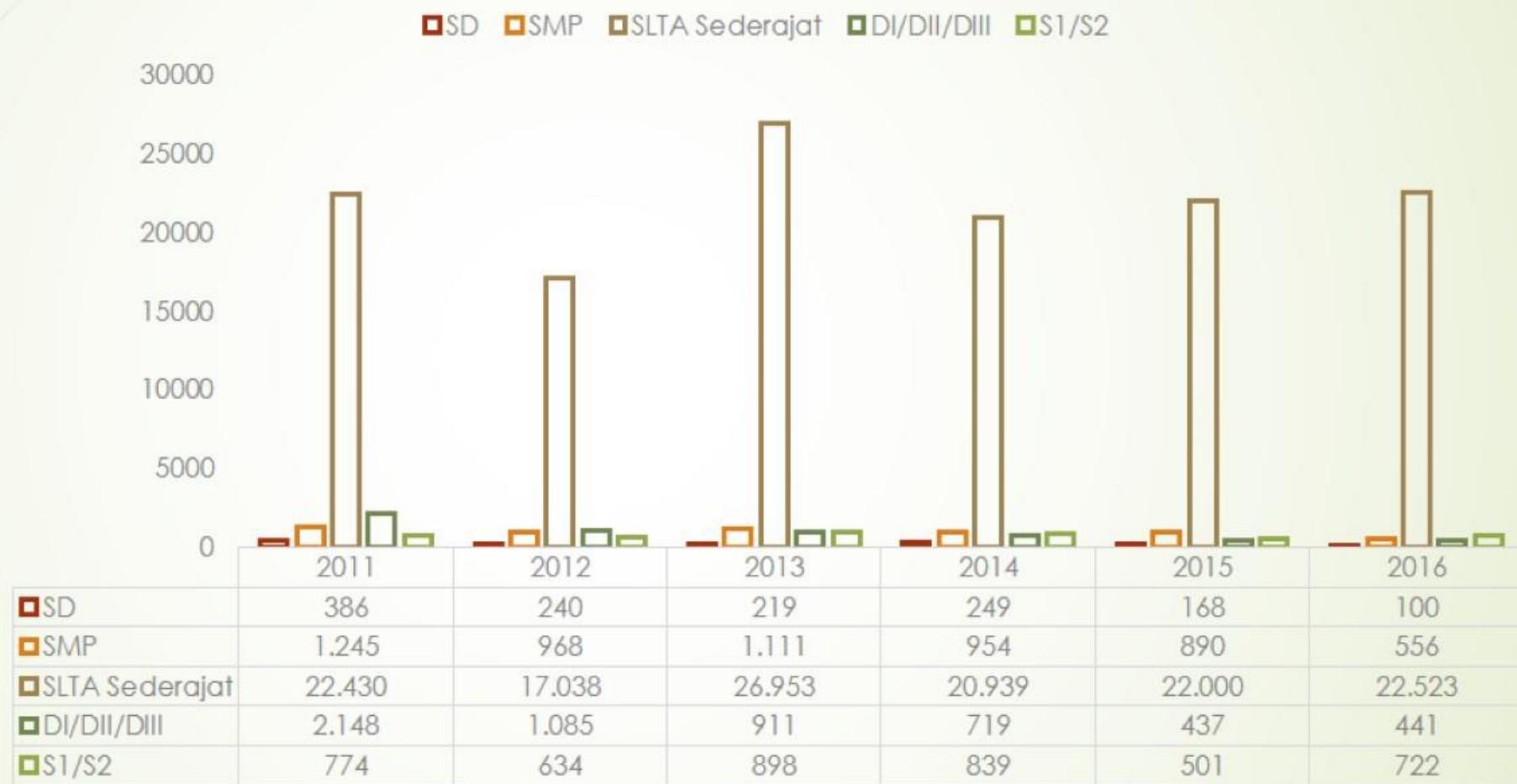


BIDANG PENEMPATAN БИДНІС ҮЕМЕШЬАТЫ

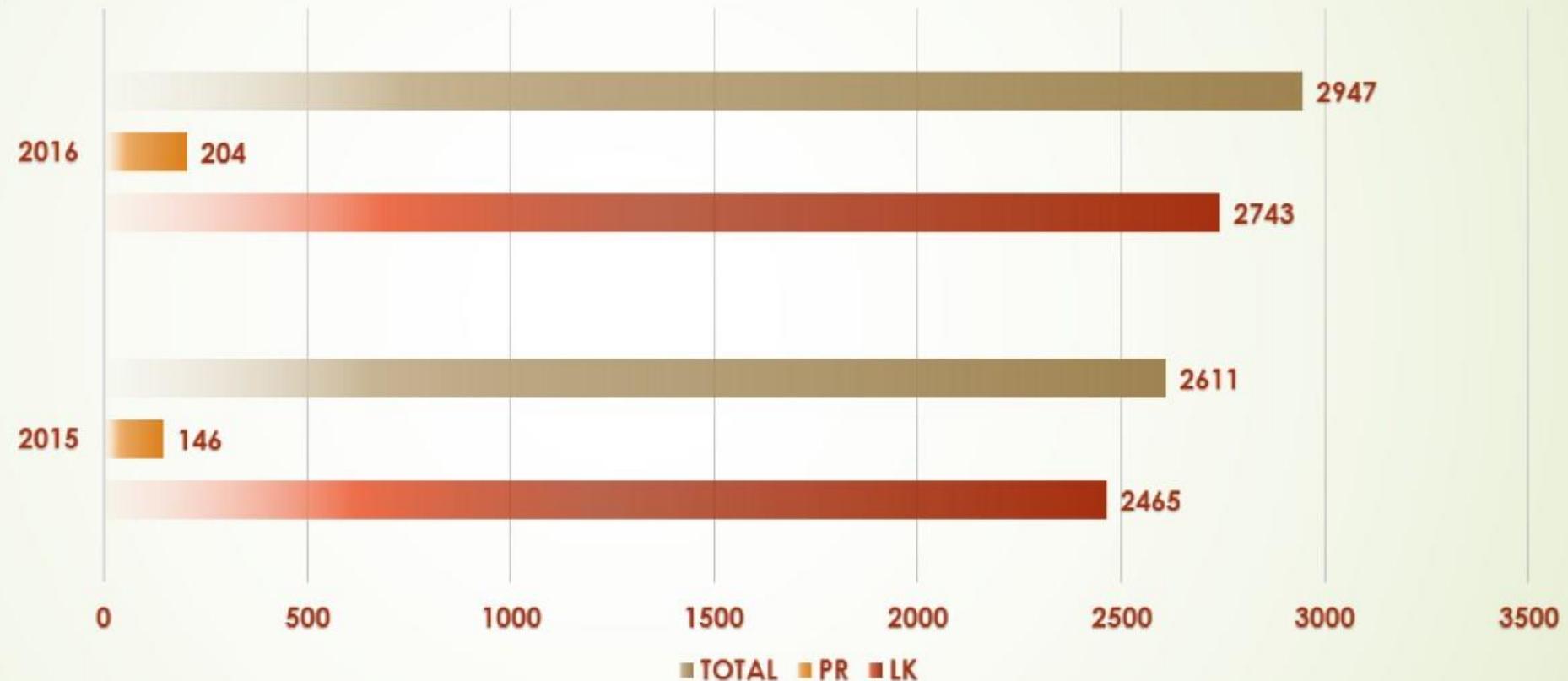
DATA PENCAKER, LOWONGAN, PENEMPATAN DAN DIHAPUSKAN TAHUN 2011-2016



PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2011 S/D 2016



REKAPITULASI RETRIBUSI IMTA PERPANJANGAN YG DIKELUARKAN OLEH BPMPTSP KOTA BATAM



KEGIATAN BIDANG PENEMPATAN TAHUN 2011 - 2016

NO.	NAMA KEGIATAN	TAHUN						JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	KASI INFORMASI PASAR KERJA							
	a. Jumlah Pencari Kerja	26.983	19.965	30.092	23.700	24.022	24.342	149.104
	b. Jumlah Lowongan	10.890	9.386	9.913	14.761	12.903	14.858	72.711
	c. Jumlah Penempatan	11.755	8.240	10.120	11.771	11.449	12.903	66.238
2.	KASI PERLUASAN KERJA							
	a. Pengembangan Kewirausahaan APBD	-	-	240	80	32	30	382
	b. Pengembangan Kewirausahaan APBN	-	-	50	-	120	200	370
	c. Padat Karya APBN	-	-	88	176	160	160	584

KEGIATAN BIDANG PENEMPATAN TAHUN 2011 - 2016

NO.	NAMA KEGIATAN	TAHUN						JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
3.	KASI PENEMPATAN							
	1. IMTA	2.774	2.356	2.877	2.729	2.611	2.947	16.294
	2. Jumlah Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	363.215	363.215
	a. AKAD	-	-	-	-	200	2.138	2.338
	b. AKL	-	-	-	-	8	12.903	12.911
	c. AKAN	-	-	-	-	65	535	600
4.	Jumlah Perusahaan LPTKS							
	a. Kantor PPTKIS	-	-	-	-	31	13	44
	b. LPTKS AKAD	-	-	-	-	23	13	36
	c. AKL	-	-	-	-	-	22	22
	d. Penerbitan Izin LPTKS	-	-	-	-	28	42	70
5.	Penampung Tenaga Kerja	-	-	-	-	7	11	18

Kegiatan Kewirausahaan Tahun 2016



Kegiatan APBD

- Pelatihan Kewirausahaan (15 peserta)
- Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (15 peserta)



Kegiatan APBN

- Kegiatan Penciptaan wirausaha baru Tenaga Kerja Muda (200 peserta)



Kegiatan APBN

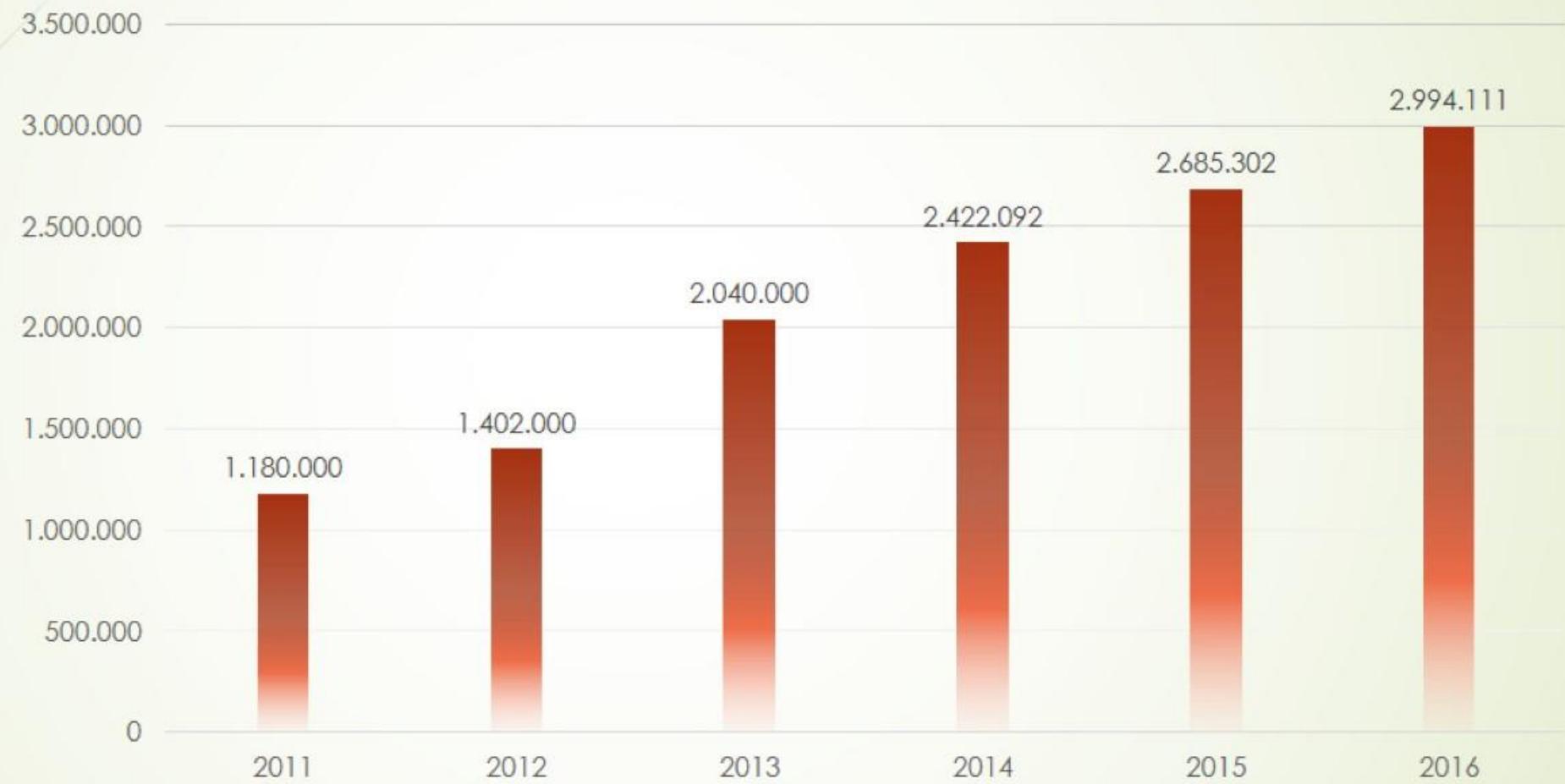
- Kegiatan Padat Karya Infrastruktur (160 peserta)



BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL & SYARAT KERJA

RIDHWAQ HUBUNGAN INDUSTRIAL & SYARAT KERJA

UMK KOTA BATAM 2011 - 2016



NILAI RATA-RATA KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM PEKERJA LAJANG PERBULAN

BULAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JANUARI	1,307,221	-	2,091,330	2,123,555	-	-
FEBRUARI	1,309,404	-	1,961,545	2,094,842	-	-
MARET	1,291,057	-	2,000,363	2,146,145	-	-
APRIL	1,286,457	-	1,998,822	2,087,098	-	-
MEI	1,260,161	1,531,072	2,010,127	2,097,389	-	-
JUNI	1,261,024	1,477,937	1,989,996	2,097,054	-	-
JULI	1,309,542	1,530,202	2,040,246	2,097,460	-	-
AGUSTUS	1,391,626	1,765,367	2,108,500	2,122,043	2,757,728	-
SEPTEMBER	1,384,677	1,835,652	2,112,383	2,158,476	2,810,785	-
OKTOBER	1,302,992	1,957,822	2,119,867	2,157,911	2,843,308	-
NOVEMBER	-	-	2,112,968	2,140,339	-	-
DESEMBER	-	2,030,191	2,173,970	2,144,371	-	-

Untuk Tahun 2016 menggunakan PP No. 78 th 2015.

**Data
Hubungan
Industrial
dan Syarat-
Syarat
Kerja Tahun
2015**

No.	Kegiatan	Tahun 2015												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	Pembinaan, Pembuatan PP	22	37	28	32	32	31	25	25	16	45	34	34	360
2.	Pembinaan, Pembuatan PKB	-	-	2	3	-	4	-	4	-	1	2	2	19
3.	Koreksi dan Registrasi PKWT	153	147	621	268	268	217	144	298	315	214	674	196	3515
4.	Jumlah Pencatatan SP/SB	7	1	4	1	1	6	-	-	-	-	-	-	20
5.	LKS Bipartit	1	3	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	18
	Organisasi Pekerja (PUK-SP)													158
6.	Organisasi Pengusaha (Jml prsh yg mjd Anggota)													798
7.	Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	-	-	-	-	-	-	-	2,757,728	2,810,785	2,843,308	-	-	-
8.	Alur Kegiatan Penunjang	1	1	-	-	1	1	1	2	1	-	2	1	9
9.	Perjanjian Pemborongan	2	2	1	15	1	3	-	4	4	18	12	3	32
10.	Pendaftaran Penyedia jasa Pekerja/buruh	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
11.	Kasus PHI	29	17	26	21	20	25	32	21	18	25	24	23	280
12.	Anjuran	21	13	10	13	11	-	-	-	8	14	12	-	149
13.	Perjanjian Bersama	5	3	7	3	5	7	13	15	5	8	12	5	88
14.	Mogok	-	2	5	3	1	5	1	1	4	7	4	3	36

**Data
Hubungan
Industrial
dan Syarat-
Syarat
Kerja
Tahun
2016**

No.	Kegiatan	Tahun 2016												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	Pembinaan, Pembuatan PP	20	43	41	29	31	33	18	47	23	28	14	34	361
2.	Pembinaan, Pembuatan PKB	3	1	1	1	1	2	0	2	4	3	-	2	20
3.	Koreksi dan Registrasi PKWT	137	315	847	500	815	385	651	500	306	236	310	466	5468
4.	Pendaftaran LKS Bipartit	1	1	2	1	-	4	3	-	-	-	2	-	14
5.	Pencatatan Organisasi Pekerja (PUK-SP)	-	2	1	6	-	-	6	1	8	1	-	4	29
6.	Pencatatan Organisasi Pengusaha (Jml prsh yg mjd Anggota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Alur Kegiatan Penunjang	1	1	1	6	-	3	1	1	1	2	1	-	18
9.	Perjanjian Pemberongan	2	1	2	9	3	10	-	6	3	3	2	5	46
10.	Kasus PHI	20	20	28	27	22	15	19	27	27	21	10	14	250
11.	Anjuran	7	12	15	10	23	15	7	-	18	-	1	-	108
12.	Perjanjian Bersama	9	8	15	1	8	1	1	1	-	-	1	-	45
13.	Mogok	2	3	6	3	5	-	3	3	3	2	1	-	31

Data Kasus 2011 - 2016

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	- Jumlah Kasus Hubungan Industrial - Jumlah TK yang Terlibat	147 Kasus 758 Orang TK	107 kasus 1.960 Orang TK	172 Kasus 970 Orang TK	242 Kasus 1.387 Orang TK	280 Kasus 2.050 Orang TK	250 Kasus 1.194 Orang TK
2	- Jumlah Kasus Selesai Dengan PB - Jumlah TK yang Terlibat	79 Kasus 666 Orang TK	40 Kasus 589 Orang TK	78 Kasus 691 Orang TK	69 Kasus 463 Orang TK	88 Kasus 280 Orang TK	57 Kasus 260 Orang TK
3	- Jumlah Kasus Selesai Dengan Anjuran - Jumlah TK yang Terlibat	50 Kasus 36 Orang TK	60 Kasus 1.345 Orang TK	68 Kasus 202 Orang TK	146 Kasus 763 Orang TK	149 Kasus 1651 Orang TK	165 Kasus 860 Orang TK
4	- Jumlah Kasus yang Tidak Melanjutkan - Jumlah TK yang Terlibat	9 Kasus 18 Orang TK	4 Kasus 12 Orang TK	11 Kasus 34 Orang TK	17 Kasus 124 Orang TK	8 Kasus 47 Orang TK	9 Kasus 9 Orang TK
5	- Kasus Dalam Proses (sisa kasus) - Jumlah TK yang Terlibat	9 Kasus 38 Orang TK	3 Kasus 13 Orang TK	15 Kasus 34 orang TK	10 Kasus 37 Orang TK	35 Kasus 72 Orang TK	19 Kasus 65 Orang TK
6	Persentase Dalam Menyelesaikan Kasus	138/147= 93,87 %	104/107= 97,19 %	157/172= 91,27 %	232/242= 95,58 %	245/280= 87,5 %	231/250 = 92,4 %

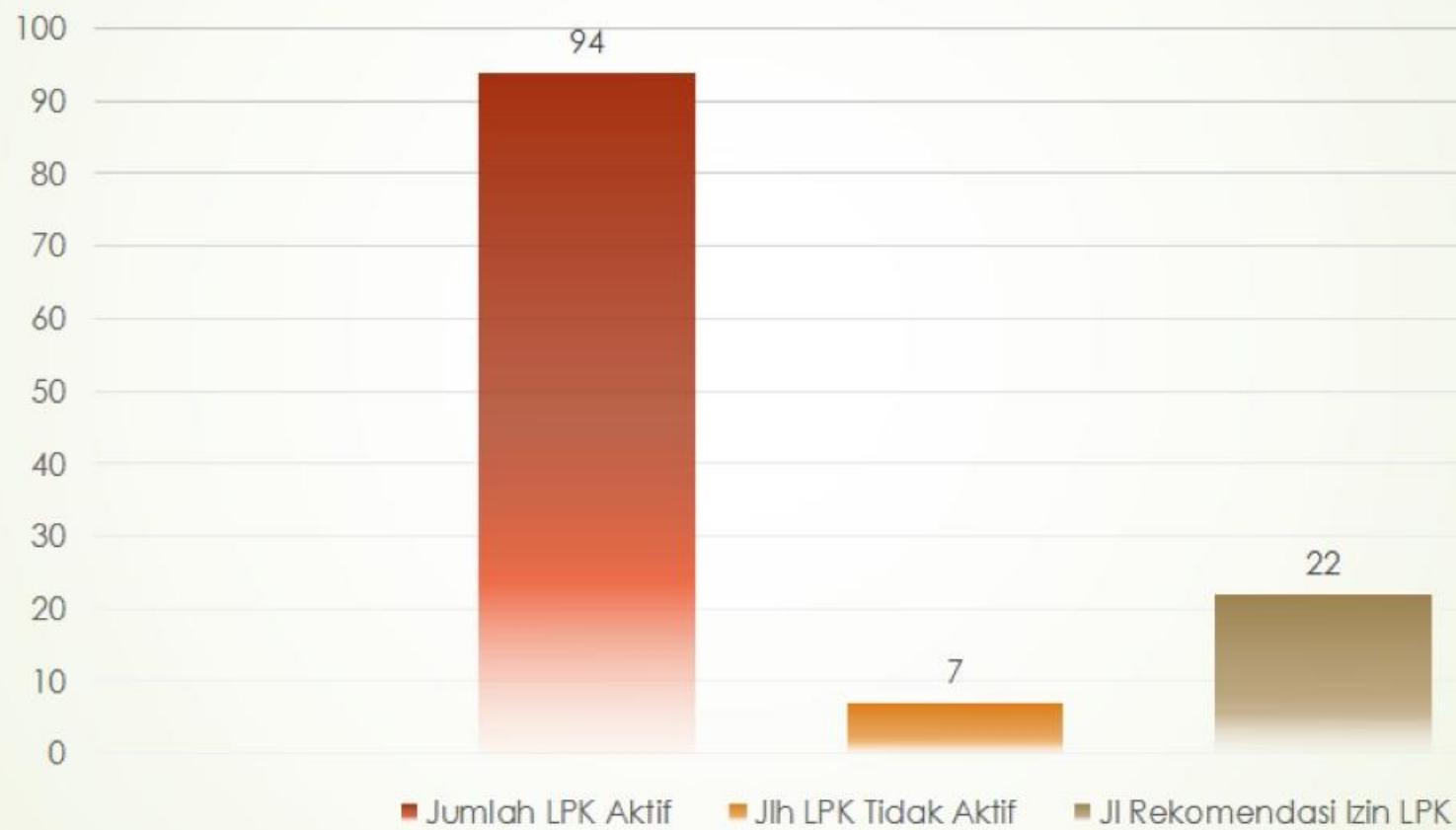


BIDANG PELATIHAN & PRODUKTIVITAS

BIDANG PELATIHAN & PRODUKTIVITAS

Rekapitulasi Izin Lembaga Pelatihan

TAHUN 2016



Jenis Pelatihan Tahun 2011-2015

No	Jenis Pelatihan	2011		2012		2013		2014		2015	
		PC	KM								
1	Cor Logam										
2	Roda Dua	20						30			
3	Welder	30						20	50		
4	Las Dasar			50		50					
5	Teknik Komputer			30		30	44	60			
6	Menjahit					30					
7	Auto Cad					30				30	
8	Design Grafis					20		60		30	
9	House Keeping						60				
10	Bordir							40	30		
11	Sablon							40	30		
12	Welding Inspector							10			10
13	Bahasa Inggris							42	60	90	30
14	Elektronika Industri							40	60		
15	Outbond							75		200	

No	Jenis Pelatihan	2011		2012		2013		2014		2015	
		PC	KM								
16	Pengelola & Instruktur							100			
17	Food & Beverage								30		
18	Body Spa								60		
19	Drafter								60		
20	HRD								55	30	
21	Ahli K3 Umum								45		20
22	Pramusaji							30			
23	Motor Tempel							60			
24	Rias Pengantin							30			
25	Safety Officer							30			
26	Microsoft Officer							30			
27	Sekretaris							30			
28	Menjahit Garmen							30			
29	Menjahit Mode							30			
30	Menjahit Baju Pengantin							30		30	

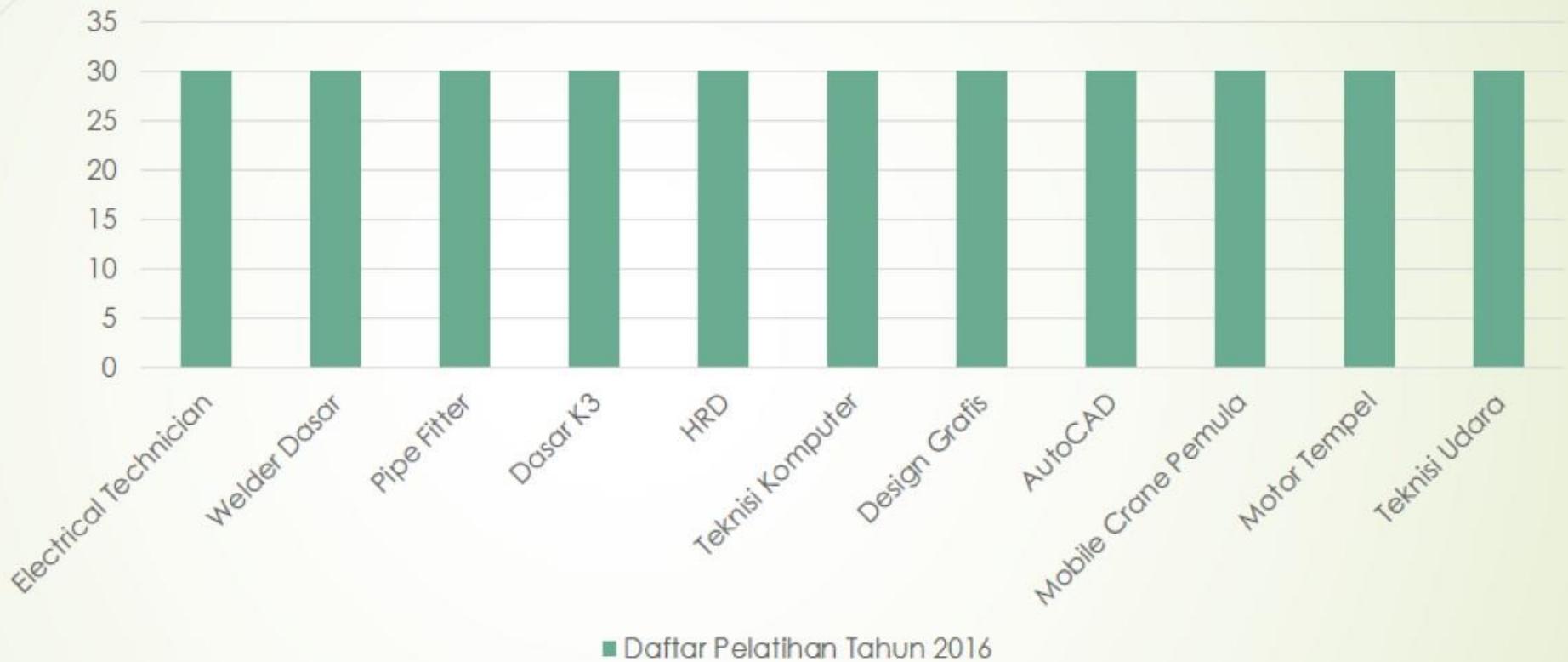


No	Jenis Pelatihan	2011		2012		2013		2014		2015	
		PC	KM	PC	KM	PC	KM	PC	KM	PC	KM
31	Welder Dasar									30	
32	Pipe Fitter									25	
33	Dasar K3									30	
34	Akutansi MYOB									20	
35	Tata Boga									25	
36	Pelatihan On Job Training (Magang)									25	
37	Petugas AK3 Umum										20
38	Sertifikasi Operator Crane s/d 25 Ton										25
Total		50	0	80	0	160	451	620	590	310	90
		50		80		611		1210		400	

Ket:
 PC = Pencari Kerja
 KM = Kemampuan

Kegiatan Pelatihan bagi Pencari Kerja

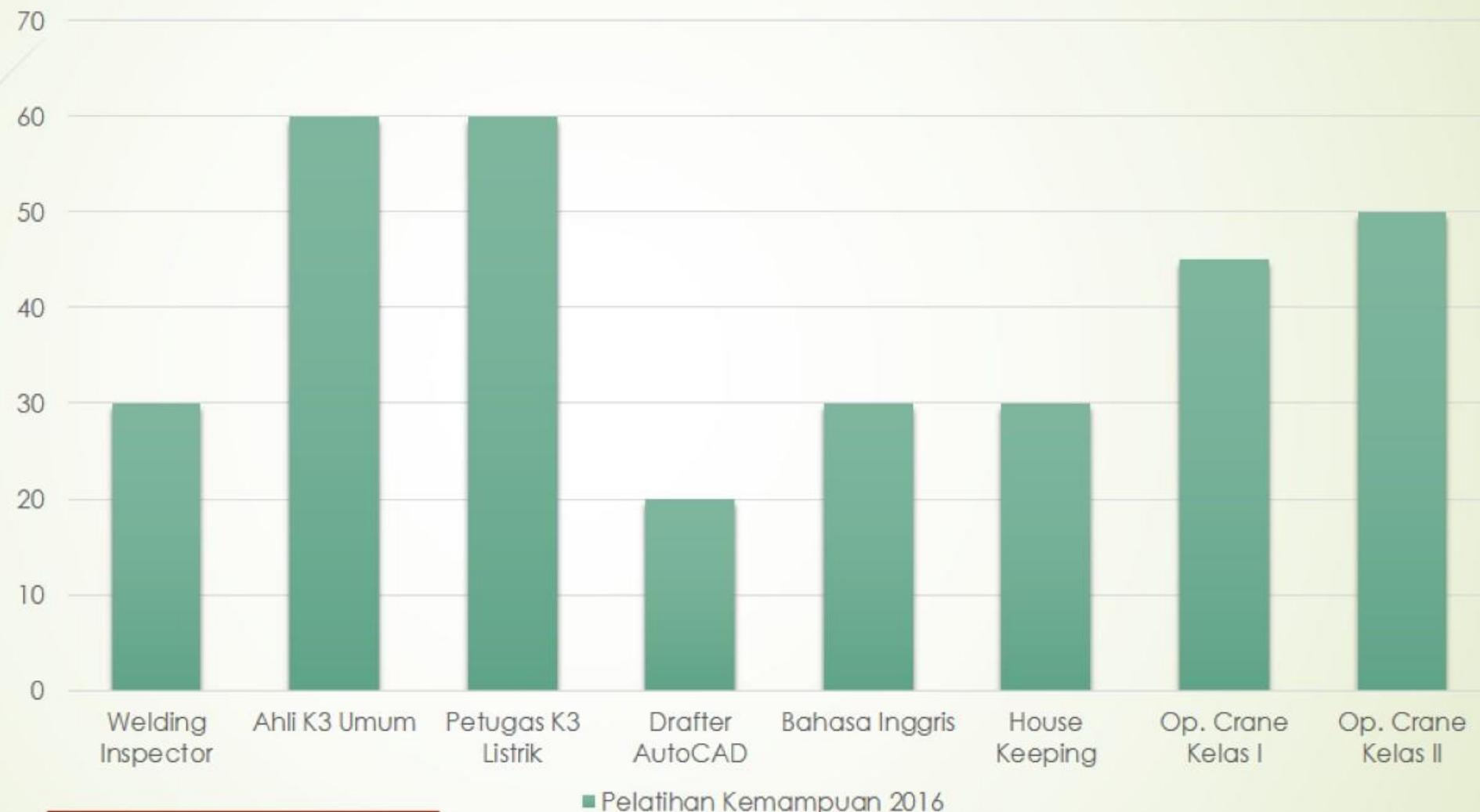
Daftar Pelatihan Tahun 2016



Jumlah : 330 Orang

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja

Pelatihan Kemampuan 2016



Jumlah : 325 Orang



BIDANG PENGAWASAN

БИДАНГ ПЕНГАВАСАН

Menurut Jenis Usaha di Kota Batam Tahun 2011

No	Jenis Usaha menurut No. KLUI	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja				Klasifikasi Perusahaan				
			WNI		WNA		B	S	M	K	
			L	P	L	P	>100	50-99	25-50	>10	<10
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	42	1,255	152	1,104	0	4	3	8	12	15
2	Pertambangan	25	416	41	30	1	0	4	4	3	14
3	Industri	1,794	81,385	89,830	2,704	165	294	154	182	218	946
4	Listrik, Gas, Air	15	359	111	6	0	1	3	1	5	5
5	Bangunan	809	26,900	5,907	310	13	56	86	129	167	371
6	Perdagangan, Perhotelan	1,099	22,258	11,413	784	32	59	94	151	330	465
	Angkutan,										
7	Pergudangan, Komunikasi	162	2,779	664	18	9	8	7	25	33	89
8	Keuangan, Asuransi	450	13,768	10,997	127	4	40	43	75	130	162
9	Jasa	511	20,763	24,546	135	68	62	50	56	125	218
Jumlah A		4,907	169,883	143,661	5,218	292	524	444	631	1,023	2,285
Jumlah B			313,544		5,510						4,907
Jumlah Keseluruhan			319,054								

Menurut Jenis Usaha di Kota Batam Tahun 2012

No	Jenis Usaha menurut No. KLUI	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja				Klasifikasi Perusahaan					
			WNI		WNA		B	S	M	>10		K
			L	P	L	P	>100	50-99	25-50	>10	<10	
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	44	1,276	170	1,105	1	4	3	9	13	15	
2	Pertambangan	26	483	44	29	1	0	5	4	3	14	
3	Industri	1,894	86,723	92,563	2,745	181	310	165	216	236	967	
4	Listrik, Gas, Air	16	738	180	9	0	2	3	1	5	5	
5	Bangunan	817	27,277	6,072	554	12	59	85	130	173	370	
6	Perdagangan, Perhotelan	1,222	25,273	11,529	866	35	66	102	174	365	515	
	Angkutan,											
7	Pergudangan, Komunikasi	173	3,127	765	18	9	9	8	26	37	93	
8	Keuangan, Asuransi	483	14,891	11,223	152	4	46	39	94	138	166	
9	Jasa	653	23,590	24,668	175	74	68	61	82	154	288	
Jumlah A		5,328	183,378	147,214	5,653	317	564	471	736	1,124	2,433	
Jumlah B			330,592		5,970							5,328
Jumlah Keseluruhan			336,562									

Menurut Jenis Usaha di Kota Batam Tahun 2013

No	Jenis Usaha menurut No. KLUI	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja				Klasifikasi Perusahaan					
			WNI		WNA		B	S	M	K		
			L	P	L	P	>100	50-99	25-50	>10	<10	
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	45	1,259	169	1,104	0	4	3	8	14	16	
2	Pertambangan	28	658	53	26	1	1	4	5	4	14	
3	Industri	1,959	92,980	97,369	2,388	180	325	179	234	238	983	
4	Listrik, Gas, Air	17	867	189	13	0	3	3	1	5	5	
5	Bangunan	817	29,494	7,197	490	9	62	89	130	169	367	
6	Perdagangan, Perhotelan	1,302	27,332	12,690	933	55	69	112	189	403	529	
	Angkutan,											
7	Pergudangan, Komunikasi	186	3,623	816	35	8	10	11	26	42	97	
8	Keuangan, Asuransi	500	14,548	10,057	154	6	48	43	101	141	167	
9	Jasa	754	26,473	23,905	205	88	67	82	103	177	325	
Jumlah A			5,608	197,234	152,445	5,348	347	589	526	797	1,193	2,503
Jumlah B				349,679		5,695						5,608
Jumlah Keseluruhan					355,374							

Menurut Jenis Usaha di Kota Batam Tahun 2014

No	Jenis Usaha menurut No. KLUI	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja				Klasifikasi Perusahaan					
			WNI		WNA		B	S	M	K		
			L	P	L	P	>100	50-99	25-50	>10	<10	
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	46	1,272	171	1,104	0	4	3	8	15	16	
2	Pertambangan	31	708	56	26	1	1	4	6	6	14	
3	Industri	1,996	95,329	86,021	2,392	175	315	189	244	250	998	
4	Listrik, Gas, Air	17	867	189	13	0	3	3	1	5	5	
5	Bangunan	821	29,529	7,201	490	9	62	89	131	170	369	
6	Perdagangan, Perhotelan	1,324	27,768	13,154	938	56	71	112	194	412	535	
7	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	189	3,644	826	35	8	10	11	26	44	98	
8	Keuangan, Asuransi	500	14,548	10,057	154	6	48	43	101	141	167	
9	Jasa	776	26,601	24,053	207	88	67	86	105	182	336	
		Jumlah A	5,700	200,266	141,728	5,359	343	581	540	816	1,225	2,538
		Jumlah B		341,994		5,702						5,700
		Jumlah Keseluruhan		347,696								

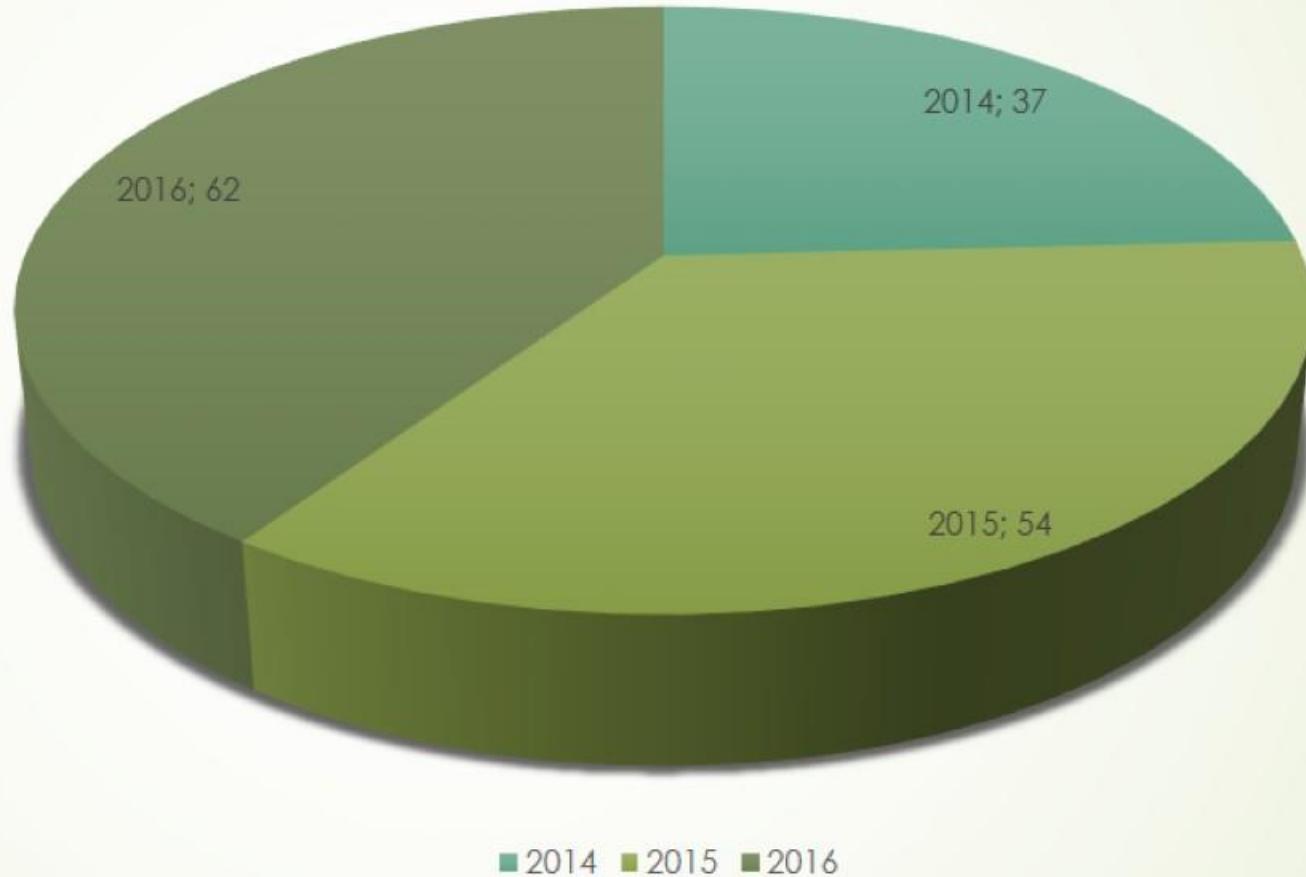
MENURUT JENIS USAHA DI KOTA BATAM 2015

No	BULAN	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja				Klasifikasi Perusahaan				
			WNI		WNA		B	S	M	10-24	K
			L	P	L	P	>100	50-99	25-49	<10	
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	46	1,272	171	1,104	-	4	3	8	15	16
2	Pertambangan	32	717	57	26	1	1	4	6	7	14
3	Industri	2,082	97,972	86,502	2,475	183	323	201	261	279	1,018
4	Listrik, Gas, Air	19	899	189	13	-	3	3	2	5	6
5	Bangunan	841	30,311	7,268	503	9	63	92	137	175	374
6	Perdagangan, Perhotelan	1,410	29,711	13,724	949	60	75	120	204	437	574
7	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	195	3,746	844	35	8	10	11	28	46	100
8	Keuangan, Asuransi	506	14,611	10,096	154	6	48	43	102	145	168
9	Jasa	878	28,105	24,479	259	106	71	93	114	205	395
10	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah A		6,009	207,344	143,330	5,518	373	598	570	862	1,314	2,665
Jumlah B			350,674		5,891					6,009	
Jumlah Keseluruhan				356,565							

MENURUT JENIS USAHA DI KOTA BATAM 2016

NO	JENIS USAHA MENURUT NO. KLUI	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				KLASIFIKASI PERUSAHAAN				
			WNI		WNA		B	S	M	K	
			L	P	L	P	>100	50-99	25-49	10 - 24	<10
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	47	1.288	175	1.104	-	4	3	8	16	16
2	Pertambangan	33	737	60	26	1	1	4	6	8	14
3	Industri	2.170	100.552	87.069	2.530	185	331	214	272	300	1.053
4	Listrik, Gas, Air	20	901	190	13	-	3	3	2	5	7
5	Bangunan	881	31.157	7.397	535	10	65	95	143	190	388
6	Perdagangan, Perhotelan	1.541	31.503	14.568	972	64	80	127	220	482	632
7	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	211	4.074	896	47	11	11	12	32	53	103
8	Keuangan, Asuransi	522	15.076	10.373	154	6	49	46	107	149	171
9	Jasa	1.034	31.605	25.594	309	117	84	104	138	236	472
10	Lain - Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah A		6.459	216.893	146.322	5.690	394	628	608	928	1.439	2.856
Jumlah B				363.215		6.084					6.459
Jumlah Kesuluruhan					369.299						

Perusahaan Tutup



DATA PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA

TAHUN	PERUSAHAAN	TENAGA KERJA		JUMLAH TK
		WNI	WNA	
2011	4.907	313.544	5.510	319.054
2012	5.328	330.592	5.970	336.562
2013	5.608	342.890	6.089	348.979
2014	5.700	341.994	5.702	347.696
2015	6.009	350.674	5.891	356.565
2016	6.459	363.215	6.084	369.299

LAPORAN KECELAKAAN KERJA TAHUN 2012 - 2016

TAHUN	JL. RAYA	MATERI AL	AL. BERAT	B. TEKAN	M. PROD	KEJATU HAN	B. KIMIA	LAIN- LAIN	MENIN GGAL DUNIA
2012	2.725	1.360	32	12	360	204	136	1.123	-
2013	2.474	1.639	5	4	361	127	53	781	-
2014	2.299	1.080	47	10	438	157	80	743	19
2015	2.218	2.306	4	1	197	144	48	341	8
2016	1.775	2.208	12	-	48	212	31	71	5

Ket : untuk data meninggal 2012 -2013 tidak tersedia.